

PENGARUH DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, UKURAN KOMITE AUDIT, KEAHLIAN KOMITE AUDIT, RAPAT KOMITE AUDIT, RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP AUDIT REPORT LAG

(Studi Empiris pada perbankan syariah yang terdaftar di OJK Tahun 2016-2020)

Dzulkifli, Totok Dewayanto¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the extent of audit report lag and its association with governance mechanisms in the Islamic banking institutions in Indonesia. The dependent variable in the study is audit report lag which is measured based on the period starting from the deadline for the company to close its books on December 31 to the date specified in the independent auditor's report. The sample of the study comprises 120 observations of Islamic banking institutions' financial reports for the period 2016-2020 using purposive sampling technique. The method that used to test the hypothesis is multiple linear regression analysis. The analysis results show that the size of the board of commissioners independent, audit committee size, audit committee expertise, and sharia supervisory board meetings have no effect on audit report lag. While the audit committee meeting has significant effect.

Keywords: Audit Reports, Corporate governance, Islamic banks, Sharia supervisory board

PENDAHULUAN

Tidak sanggup dielakkan kalau laporan keuangan tahunan negara-negara berkembang merupakan sumber informasi yang penting (Kaaroud et al., 2020). Laporan keuangan memberikan fungsi komunikasi yang penting antara perusahaan dengan pihak eksternal yang membutuhkannya, seperti investor. IAI (2009) berpendapat bahwa informasi tentang kondisi keuangan perusahaan, kinerja, dan setiap perubahan yang terjadi di perusahaan ada di laporan keuangan, dan dengan informasi tersebut digunakan oleh sebagian besar pengguna ketika mengambil keputusan ekonomi.

Istilah “Andal/ *relevance*” mengacu pada laporan keuangan yang berguna bagi pengambil keputusan agar tidak mencelakakan pengguna, tidak mengandung kekeliruan material, mengandung informasi yang benar, dan disajikan dengan benar. Pada kenyataannya, menyediakan laporan keuangan yang memenuhi standar relevansi terdapat hambatan, salah satu diantaranya adalah ketepatan waktu/ *timeliness*. Menurut Owusu-Ansah (2000) laporan keuangan yang tepat waktu sangat penting untuk pengambilan keputusan bisnis. Argumen tersebut juga didukung oleh IAI (2012) bahwa informasi yang disediakan kepada publik dengan durasi yang pas ialah salah satu persyaratan untuk menghasilkan informasi yang relevan.

Financial reporting timeliness mengacu pada informasi yang siap digunakan sebelum pengguna laporan keuangan kehilangan makna, dan kemampuannya dalam pengambilan keputusan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2012). Menurut Financial Accounting Standard Board (2010) ketepatan waktu didefinisikan sebagai penyediaan informasi yang tepat waktu kepada pengambil keputusan sebelum mempengaruhi nilai pengambil keputusan. Laporan keuangan akan kehilangan nilai informasi jika tidak disajikan tepat waktu, sehingga dapat menimbulkan asimetris informasi. Risiko asimetris informasi meningkatkan tingkat ketidakpastian yang terkait dengan keputusan investasi karena beberapa investor memiliki informasi, sementara yang lain tidak. Dengan kata lain, ketika laporan keuangan yang telah diaudit membutuhkan waktu lama untuk dirilis ke publik, manfaat yang lebih besar dari informasi keuangan yang bermanfaat semakin berkurang (Al-Ajmi, 2008).

¹ Corresponding author

Berbagai penelitian mencoba menjelaskan ketepatan waktu laporan perusahaan, tetapi terutama menggunakan data dari negara maju menggunakan indikator tingkat *audit report lag*. Perihal ini disebabkan laporan keuangan tidak dapat dirilis ke publik tanpa diaudit dan diverifikasi oleh auditor. Ketika laporan keuangan sudah diaudit maka hal tersebut menjadi suatu pandangan yang benar dan adil.

Pentingnya ARL telah mendorong penelitian sebelumnya untuk menyelidiki banyak faktor yang mempengaruhi tingkat keterlambatan dalam laporan audit, termasuk aspek-aspek yang dapat dianggap berasal dari karakteristik dan kompleksitas bisnis tertentu seperti profitabilitas, usia dan ukuran perusahaan, jenis perusahaan audit, kualifikasi audit, dan biaya audit. Faktor lain seperti mekanisme tata kelola perusahaan juga telah diselidiki. Misalnya, karakteristik dari komite audit, dewan komisaris, dan fungsi audit internal digunakan sebagai variabel independen untuk menguji hubungannya dengan tingkat *audit report lag* di berbagai negara seperti yang dilakukan oleh Durand (2019); Habib & Bhuiyan (2011); Hani Warrad (2018) dan Hashim & Rahman (2011).

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Penelitian yang mempelajari mengenai *Corporate Governance* dan hubungannya dengan *audit report lag* didasarkan pada teori agensi (Ika & Mohd Ghazali, 2012; Kaaroud et al., 2020; Zulfikar et al., 2020). Menurut Jensen & Meckling (1976) struktur perusahaan modern berawal dari pemisahan kepemilikan dan pengendalian. Bentuk pemisahan yang dihasilkan dalam apa yang disebut hubungan keagenan menggambarkan hubungan antara *principal* (pemilik) dan agen (manajemen). Karena ikatan antara *principal* dan agen tidak selalu memiliki kemiripan informasi antara keduanya, tidak jarang ditemui beberapa masalah keagenan dan pembagian risiko dalam pelaksanaan perusahaan. Ketika *principal* dan agen memiliki tujuan yang bertentangan (konflik kepentingan), masalah keagenan dapat muncul karena adanya asimetris informasi di antara agen dan *principal*. Asimetri informasi adalah ketidakseimbangan informasi yang timbul karena penyaluran kabar yang tidak merata yang diterima oleh prinsipal dan agen.

Jadi teori agensi dalam penelitian ini relevan karena membahas mengenai hubungan antara fungsi pengawasan seperti dewan komisaris, dewan pengawas syariah dan karakteristik komite audit dalam mempengaruhi tingkat *audit report lag* yang diharapkan mengurangi masalah keagenan. Mekanisme pengawasan berkaitan dengan prosedur tata kelola perusahaan dan bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa kinerja manajemen dan proses pelaporan keuangan dilakukan dengan cara yang tepat. Jika organisasi memiliki risiko bisnis yang lebih kecil, laporan keuangan dapat dipublikasikan pada waktu yang tepat, karena risiko bisnis yang lebih kecil berarti risiko audit yang lebih kecil serta berhubungan dengan auditor yang memerlukan sejumlah besar waktu untuk melakukan audit tahunan, sehingga mengurangi keterlambatan dalam laporan audit (Nelson & Shukeri, 2011).

Dewan Komisaris Independen terhadap *Audit Report Lag*

Kehadiran dewan komisaris independen dapat membantu memperketat kontrol atas pengawasan, karena tujuan berlakunya pihak independen di jajaran dewan komisaris adalah sebagai penyeimbang keputusan yang ditetapkannya dan juga sebagai pelindung pemegang saham kecil, menengah serta pemangku kepentingan lainnya. Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Naimi et al. (2010), dewan komisaris independen dan *audit report lag* terkait secara negatif. Artinya, ketika perusahaan mempunyai komisaris independen yang lebih besar dengan dibuktikan melalui pengukuran persentase yang ada, daripada perusahaan yang hanya memiliki komisaris independen sesuai dengan standar maka fungsi pengawasan yang dilakukannya tergolong lebih baik ketimbang dewan komisaris yang bukan dari pihak independen. Selain itu, penelitian lain seperti (Afify, 2009; Kaaroud et al., 2020; Lajmi & Yab, 2021) juga mengungkapkan bukti yang sama dengan argumen di atas, bahwa komisaris independen memiliki dampak yang negatif pada *audit report lag*.

H1: Dewan Komisaris Independen secara negatif terkait dengan tingkat ARL di lembaga perbankan syariah di Indonesia

Ukuran Komite Audit terhadap *Audit Report Lag*

Menurut teori keagenan, komite audit dengan keanggotaan yang lebih besar dapat membantu mengurangi ketidakseimbangan informasi atau yang biasa disebut asimetri informasi

yang ada di seluruh lembaga/ perusahaan. Anggota yang lebih besar dalam hal kuantitas keanggotaan komite audit memberikan lebih banyak pengaruh, yang membantunya menghasilkan laporan yang lebih baik dan melakukan lebih banyak pekerjaan dalam durasi yang lebih pendek (Naimi et al., 2010). Menurut Kaaroud et al. (2020), ukuran komite audit memiliki korelasi negatif dengan *audit report lag* di Malaysia, meskipun secara statistik tidak signifikan. Selain itu, Naimi et al. (2010) juga menyatakan bahwa ukuran komite audit memiliki hubungan negatif dengan *audit report lag*.

H2: Ukuran komite audit secara negatif terkait dengan tingkat ARL di lembaga perbankan syariah di Indonesia

Keahlian Komite Audit terhadap *Audit Report Lag*

Menurut teori agensi, kehadiran spesialis keuangan meningkatkan peran pengawasan komite audit dan menjamin efisiensi pekerjaan auditor eksternal (Sultana et al., 2015). Oleh karena itu, semakin komite audit memiliki banyak anggota dengan kemampuan akuntansi atau keuangan, semakin pendek jeda pada *audit report lag* perusahaan. Penelitian Raweh et al. (2019) mendeteksi kalau komite audit dengan keahlian keuangan mendorong semakin menurunnya durasi waktu yang terjadi pada *audit report lag*.

H3: Keahlian komite audit secara negatif terkait dengan tingkat ARL di lembaga perbankan syariah di Indonesia.

Rapat Komite Audit terhadap *Audit Report Lag*

Ragunandan et al. (1998) percaya bahwa melalui pertemuan rutin memungkinkan komite audit untuk tetap *up-to-date* tentang masalah akuntansi atau audit, serta dapat membantu personel internal perusahaan dan auditor eksternal untuk menangani masalah secara tepat waktu. Selama rapat komite audit, komite audit akan menemukan permasalahan dalam proses pelaporan keuangan, jika frekuensi rapat yang dialami adalah rendah maka akan membutuhkan waktu lebih lama untuk memperbaiki dan menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Sesuai dengan temuan Naimi et al. (2010), perusahaan yang memiliki keanggotaan komite audit yang lebih rajin lebih mungkin untuk memberikan laporan keuangan yang diaudit sesuai jadwal.

H4: Rapat komite audit secara negatif terkait dengan tingkat ARL di lembaga perbankan syariah di Indonesia

Rapat Dewan Pengawas Syariah terhadap *Audit Report Lag*

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah nyaris serupa dengan tujuan komite audit yaitu untuk memantau lembaga keuangan syariah (Rahmawan Arifin et al., 2021). Penelitian empiris Rini (2014) menemukan bahwa Dewan Pengawas Syariah memainkan peran dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, kualitas yang dimaksud dalam penelitiannya adalah memenuhi salah satu karakteristik dari laporan keuangan berkualitas yaitu, *timeliness*. Oleh karena itu, di perbankan syariah, semakin tinggi frekuensi rapat dewan pengawas syariah, semakin besar kontrol semua transaksi yang terjadi, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja dan memperpendek *audit report lag*.

H5: Rapat Dewan pengawas syariah terkait dengan tingkat ARL di lembaga perbankan syariah di Indonesia

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Seperti yang telah dideklarasikan sebelumnya bahwa *audit report lag* digunakan sebagai variabel dependen. Istilah *audit report lag* sama dengan *audit delay* yang berarti jeda yang dibutuhkan oleh auditor untuk menyelesaikan laporan audit suatu perusahaan dari hari dimana perusahaan tutup buku sampai terbitnya laporan audit perusahaan tersebut. Sedangkan variabel independen pada penelitian ini adalah dewan komisaris independen, ukuran komite audit, keahlian komite audit, rapat komite audit, dan rapat dewan pengawas syariah.

Dewan komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris yang tidak berkaitan atau berhubungan dengan para *stakeholder* sehingga diharapkan pengawasan terhadap operasional perusahaan dapat berjalan secara efektif. Penelitian ini menggunakan proporsi yang diukur

berdasarkan komisariss dari pihak independen yang berada di suatu perusahaan dengan total keseluruhan dewan komisariss yang ada (Kaaroud et al., 2020).

Dalam melaksanakan peran serta wewenangnyaa, dewan komisariss memerlukan bantuan, maka dari itu dewan komisariss membentuk sebuah komite audit yang bertugas untuk membantu pihak komisariss melaksanakan tugasnyaa. Bila mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh OJK nomor 55 maka jumlah anggota yang seharusnya ada di satuan komite audit berjumlah minimal tiga anggota. Kaaroud et al. (2020) mengukur variabel ukuran komite audit dengan menggunakan variabel *dummy*. Mengacu pada penelitiannyaa maka jika jumlah komite audit dalam suatu perusahaan lebih dari minimal sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu setidaknya memiliki tiga anggota maka dikatakan besar dan diberi kode 1, sedangkan jika perusahaan tersebut hanya memiliki jumlah anggota sesuai minimal peraturan yaitu tiga maka ukuran komite audit tersebut dikatakan kecil dan diberi kode 0.

Tugas utama komite audit adalah untuk menjamin bahwa prosedur pelaporan dan pengungkapan keuangan dikelola dan dipantau dengan benar. Untuk mendukung terciptanya tanggung jawab yang memadai, anggota komite audit memerlukan sebuah keterampilan di bidangnya masing-masing, terutama dalam bidang akuntansi dan keuangan. Menurut Kaaroud et al. (2020) auditor yang tidak memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi, auditor tersebut akan kerepotan dalam menghadapi masalah yang dihadapinyaa, dan pada akhirnya akan menyebabkan fungsi pengawasan ikut menurun. Penelitian ini menggunakan variabel *dummy* untuk mengukur keahlian komite audit, yang mengacu pada penelitian (Kaaroud et al., 2020). Jika mayoritas anggota komite audit secara harfiah adalah ahli keuangan/akuntansi (misalnya terdapat sertifikat akuntansi/bidang keuangan lainnya) atau menjadi anggota badan profesional akuntansi mana pun diberi kode 1, jika tidak diberi kode 0.

Ketika komite audit lebih sering mengadakan pertemuan maka komite audit akan berperan lebih aktif dan efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan. Peraturan OJK No 55/PJOK.04/2015 mewajibkan komite audit untuk menyelenggarakan rapat guna melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan yang disajikan sehingga diharapkan apabila intensitas rapat yang diselenggarakan tinggi maka akan meningkatkan fungsi pengawasan. Untuk menilai variabel rapat komite audit, penelitian ini menghitung jumlah rapat yang diadakan sepanjang tahun buku yang mengacu pada penelitian (Kaaroud et al., 2020).

Pada dasarnya tata kelola perusahaan di lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah berbeda, ini tercermin dari adanya dewan pengawas syariah yang merupakan dewan yang vital bagi kelangsungan bisnis di perbankan syariah karena lembaga keuangan syariah harus mematuhi hukum syariah atau *shariah compliance*. Sama halnya dengan komite audit, dewan pengawas syariah juga mengadakan pertemuan rapat untuk membahas masalah yang berhubungan dengan kepatuhan di bidang syariah. Penelitian ini memakai indikator jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah selama satu tahun di perbankan syariah yang mengacu pada penelitian Baklouti (2020) untuk mengukur variabel rapat dewan pengawas syariah.

Dalam penelitian ini ukuran perusahaan berfungsi sebagai variabel kontrol yang bisa dihitung berdasarkan seluruh nilai aset perusahaan. Perusahaan besar dan kecil ditentukan berdasarkan nilai aset yang tercantum pada laporan keuangan masing-masing perusahaan. Perusahaan yang lebih besar, menurut Naimi et al. (2010) dapat memutuskan untuk menerapkan kontrol internal yang ketat. Perusahaan yang termasuk dalam kategori “perusahaan besar” menuntaskan prosedur penilaian jauh lebih kilat daripada perusahaan kecil. Hal tersebut terjadi karena perusahaan yang lebih besar diawasi ketat oleh investor, regulator serta pemerintahan setempat. Logaritma natural (\ln) dari total aset digunakan untuk menilai variabel kontrol perusahaan dalam penelitian ini (Kaaroud et al., 2020).

Penentuan Sampel

Perusahaan perbankan syariah di Indonesia, khususnya Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang keduanya terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, berfungsi sebagai sampel untuk penelitian ini. *Purposive sampling* dipakai guna memilih sampel yang representatif dengan penelitian. Tolak ukur untuk memilih sampel yang hendak dipakai, yakni: perusahaan yang mengeluarkan laporan tahunan selama tahun 2016-2020 berturut-turut, terdaftar di Otoritas Jasa

Kuangan, menggunakan mata uang rupiah, dan data yang lengkap sesuai dengan yang dibutuhkan untuk penelitian.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda untuk melihat hubungan fungsional sebuah variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen (Neter, 1997). Persamaan model penelitian adalah sebagai berikut:

$$ARL = \beta_0 + \beta_1(BIND) + \beta_2(ACSIZE) + \beta_3(ACEXP) + \beta_4(ACMEET) + \beta_5(SSBMEET) + \beta_6(IBSIZE) + \varepsilon$$

Keterangan:

β_0	=	konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$	=	koefisien masing-masing variabel
BIND	=	proporsi antara jumlah komisaris independen dan jumlah total anggota dewan
ACSIZE	=	jika jumlah anggota komite audit besar diberi kode 1, 0 jika lainnya.
ACEXP	=	jika mayoritas anggota komite audit adalah ahli keuangan/akuntansi diberi kode 1, 0 jika lainnya.
ACMEET	=	jumlah rapat yang dilakukan oleh komite audit sepanjang tahun
SSBMEET	=	jumlah rapat DPS selama satu tahun
IBSIZE	=	natural log total aset perusahaan
ε	=	Estimasi eror

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Populasi dan sampel perbankan syariah Indonesia yang dipakai telah divisualisasikan pada tabel 1. Dari tahun 2016 hingga 2020, populasi perbankan syariah di Indonesia secara keseluruhan adalah 170, namun terdapat 20 sampel yang tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan, dan 30 sampel sisanya tidak memiliki informasi keuangan yang komprehensif. Sebanyak 24 BUS serta UUS telah mencukupi syarat guna melakukan penelitian, sehingga jumlah observasi adalah 120.

Tabel 1
Populasi dan Sampel

Keterangan	Jumlah Observasi
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang terdaftar di OJK secara berturut-turut pada periode 2016-2020	34
Bank Umum Syariah yang tidak menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan yang telah diaudit dan berakhir 31 Desember untuk periode 2016-2020	(4)
Bank Umum Syariah yang tidak memiliki data lengkap untuk penelitian selama periode 2016-2020	(6)
Total Perusahaan yang kriterianya terpenuhi	24
Jumlah sampel selama 5 tahun	120

Sumber: Data sekunder dari OJK dan *annual report*, 2022

Analisis Data

Statistik Deskriptif

Sampel dapat dibandingkan dan sifat yang melekat padanya dapat dijelaskan dengan menggunakan statistik deskriptif. Dengan statistik deskriptif, peneliti menghindari membuat generalisasi apa pun tentang populasi secara keseluruhan. Analisis deskriptif statistik dari variabel penelitian menghasilkan temuan yang divisualisasikan pada tabel 2, 3 dan 4.

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
ARL	120	6	120	50,22	23,853

BIND	120	0,50	1,00	0,632	0,13039
ACMEET	120	4	39	13,41	7,063
SSBMEET	120	7	48	14,91	5,411
IBSIZE	120	27,21	32,47	29,8855	1,23757

Sumber: Data sekunder yang diolah,2022

Tabel 3
ACSIZE

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Minimal 3	48	40,0	40,0	40,0
	Lebih dari 3	72	60,0	60,0	100,0
	Total	120	100,0	100,0	

Sumber: Data sekunder yang diolah,2022

Tabel 4
ACEXP

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Bukan Mayoritas	61	50,8	50,8	50,8
	Mayoritas	59	49,2	49,2	100,0
	Total	120	100,0	100,0	

Sumber: Data sekunder yang diolah,2022

Hasil dari analisis semua variabel yang dipakai sesuai dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya ditunjukkan pada Tabel 2 dengan menggunakan statistik deskriptif. Nilai terendah dan maksimum setiap variabel, serta rata-rata dan standar deviasinya, tercantum dalam tabel tersebut. Terdapat variabel ARL yang memiliki *mean* 50 hari dan standar deviasi 23,853 dengan kisaran 6 sampai 120 hari waktu ARL tersebut. Sesuai dengan statistik deskriptif, pengguna laporan keuangan rata-rata harus menunggu selama 50 hari sebelum menerima laporan tahunan yang akan berguna untuk keputusan ekonomi.

Dewan komisaris independen (BIND) adalah variabel independen pertama yang digunakan yang dapat diukur berdasarkan proporsi pihak independen yang berada di dewan komisaris terhadap dewan komisaris secara keseluruhan. Bank Muamalat Indonesia dan Bank BNI Syariah, memiliki nilai minimal 0,5 dan Bank Mega Syariah memiliki nilai maksimum 1, menurut data deskriptif yang divisualisasikan melalui tabel 2. Sementara *mean* adalah 0,632695106 dengan standar deviasi adalah 0,1303987, ini menandakan bahwa perbankan syariah yang menjadi sampel penelitian tidak melanggar aturan batas yang ditetapkan oleh OJK, yaitu 30% .

ACSIZE menjadi variabel kedua yang akan dibahas serta memiliki peran yang cukup penting. ACSIZE diukur berdasarkan total keanggotaan komite audit selama tahun buku berlangsung. Variabel ACSIZE dengan kode 0 sebanyak 48% sedangkan yang memiliki kode 1 yaitu 72%. Angka tersebut bisa diterjemahkan menjadi rata-rata ukuran komite audit di perbankan syariah tidak hanya memenuhi aturan yang berlaku, yaitu 3 orang setiap komite audit, melainkan menambahkan anggota lain yang dirasa perlu untuk menjalankan operasi perusahaan menjadi lebih baik.

Selain itu, variabel *dummy* keahlian komite audit (ACEXP) menunjukkan adanya komite audit yang memiliki pengalaman akuntansi dan keuangan. Sesuai dengan visualisasi pada tabel 4, maka sebanyak 61% memiliki kode 0 dan sebaliknya hanya 59% yang memiliki kode 1. Bila dilihat secara keseluruhan melalui data, maka kebanyakan perbankan syariah hanya menggunakan peraturan minimal yang menyebutkan bahwa satu anggota dari ketiga anggota komite audit memiliki keahlian akuntansi atau keuangan. Karena hal tersebut, jarang ditemukan anggota komite audit yang mayoritas dalam satu badan memiliki keahlian akuntansi atau keuangan.

Ada berbagai macam nilai untuk ACMEET, yang mengukur jumlah rapat komite audit yang diadakan setiap tahun, mulai dari nilai minimal 4 di Bank Panin Syariah menunjukkan rapat komite audit sepanjang tahun memiliki nilai minimum sebesar 4 pada Bank Panin Syariah, kemudian nilai maksimal 39 di Unit Usaha Syariah BPD Kalimantan selatan, dengan rata-rata dan standar deviasi adalah 13,41 dan 7,063. Memang terdapat bank yang hanya melakukan pertemuan berdasarkan ketentuan minimal saja, namun hal tersebut hanya terjadi di sebagian bank. Secara

keseluruhan BUS dan UUS membutuhkan 13 kali pertemuan selama satu tahun untuk mengatasi persoalan yang terjadi.

Rata-rata tahunan rapat dewan pengawas syariah (SSBMEET), yang mewakili aktivitas dewan, adalah 14,91, atau 15 pertemuan jika angka tersebut dibulatkan. Dewan pengawas syariah dapat dikatakan memiliki pertemuan rutin secara teratur, sesuai dengan frekuensi rata-rata yang tercantum pada tabel 2. Nilai minimum SSBMEET adalah 7, hal tersebut mengindikasikan bahwa jumlah rapat dewan pengawas syariah terendah sebesar 7 kali dalam setahun, yaitu pada Bank Syariah Bukopin dan nilai maksimum adalah 48 yaitu pada Bank Aceh Syariah, yang berarti bahwa dewan pengawas syariah paling sering melakukan rapat 48 kali dalam satu tahun. Sementara deviasi standar keseluruhan bank umum syariah adalah 5,411.

Menurut IBSIZE (logaritma natural dari total aset perusahaan selama satu tahun), ukuran perusahaan berkisar dari nilai rendah 27,2183 hingga nilai sangat tinggi yaitu 32,4744. Reratanya adalah 29,8855 dan standar deviasinya adalah 1,23757.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tes dilakukan dengan memanfaatkan pengujian *non-parametrik Kolmogorov-Smirnov* (KS) untuk menemukan jawabannya. Jika ambang batas signifikan lebih dari 5%, distribusi residu dikatakan normal dan jika di bawah 5% maka distribusi residu data dianggap tidak normal. Bila melihat hasil penelitian ini, maka uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* dengan nilai signifikansinya mencapai 0,074 yaitu lebih dari 5%. Akibatnya, distribusi residual normal dapat dilihat pada kumpulan data pada model regresi yang dipakai untuk melakukan pengujian.

Uji Multikolinieritas

Untuk memvisualisasikan terjadinya masalah multikolinieritas bisa diamati melalui nilai *tolerance* dan VIF. Uji multikolinieritas melalui nilai yang bisa diamati berdasarkan angka yang tercantum pada *tolerance* dan VIF antar variabel, menghasilkan nilai korelasi masing-masing sebesar; *tolerance* lebih dari 0,10 sedangkan nilai VIF semua variabel independen tidak melebihi batas maksimum yaitu 10. Dengan demikian, bisa dinyatakan kalau permasalahan multikolinieritas dapat dikesampingkan karena model ini terbebas dari hal tersebut.

Uji Heteroskedastisitas

Uji *glejser* untuk heteroskedastisitas akan digunakan dalam penelitian ini. Untuk model heteroskedastisitas, nilai signifikan harus di atas 5% atau 0,05. Setelah dilakukan uji *glejser* untuk heteroskedastisitas, hasilnya nilai signifikan pada setiap variabel independen, yaitu di atas tingkat kepercayaan sebesar 5% atau 0,05. Dengan demikian, bisa dinyatakan kalau masalah heteroskedastisitas dapat dikesampingkan karena model yang dipakai terbebas dari hal tersebut.

Uji Autokorelasi

Uji Durbin-Watson dipakai guna melakukan uji autokorelasi dengan kriteria ketentuan jika nilai $dU < d < 4-dU$ maka tidak terdapat permasalahan pada autokorelasi. Adapun hasil pengujiannya nilai *Durbin Watson* (DW) adalah 1,941, lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai Du tetapi lebih rendah dari nilai $4-Du$ sebesar 2,059. Menurut Ghozali (2018) tidak ada korelasi jika daerah krusial tidak melebihi atau kurang. Sesuai dengan uji *Durbin Watson* tersebut dapat dinyatakan kalau model regresi yang dipakai terbebas dari permasalahan autokorelasi dan juga model ini dapat lanjut ke tahap selanjutnya karena tidak melanggar semua kriteria persyaratan yang diajukan oleh asumsi klasik.

Uji koefisien Determinasi (Uji- R^2)

Nilai *adjusted R²* model ini sebesar 0,105. Maksud dari nilai tersebut adalah, *adjusted R²* memberitahukan bahwa model yang dipakai hanya menjelaskan varians *audit report lag* sebesar 10,5%. Sisanya yaitu variabel tertentu yang tidak menjadi acuan model penelitian menyumbang sebesar 89,5%.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Bila mengacu Ghozali (2018), uji ini dipakai guna memberitahukan apakah variabel independen yang tercantum dalam model regresi memiliki dampak secara gabungan terhadap variabel dependennya. Dengan acuan bila ambang batas nilai signifikansi 5% yang tercantum pada tabel pengujian melebihi nilai tersebut. Atas uraian di atas maka angka yang tertera pada pengujian memberitahukan kalau nilai signifikansi model yang dipakai sebesar 0,005. Artinya, nilai tersebut lebih rendah dari ambang batas kriteria yang ditetapkan ($0,005 < 0,05$). Dalam pengertian yang lebih sederhana, bahwa *audit report lag* dipengaruhi oleh semua faktor independen yang dijadikan dalam model regresi, seperti BIND, ACSIZE, ACEXP, ACMEET, IBSIZE, SSBMEET.

Uji Statistik t

Tabel 5
Hasil Uji Statistik t

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	150,337	43,195		3,480	0,001
BIND	-17,548	17,603	-0,090	-0,997	0,321
ACSIZE	1,450	4,600	0,028	0,315	0,753
ACEXP	-7,527	4,629	-0,150	-1,626	0,107
ACMEET	-0,928	0,324	-0,259	-2,865	0,005
SSBMEET	0,054	0,441	0,012	0,132	0,895
IBSIZE	-4,626	2,029	-0,209	-2,280	0,024

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Dewan Komisaris Independen terhadap *Audit Report Lag*

Hipotesis pertama mengharapkan hubungan negatif antara independensi dewan dan sejauh mana tingkat ARL di lembaga perbankan syariah Indonesia, namun hipotesis tersebut ditolak berdasarkan pengujian yang telah dilakukan seperti yang telah divisualisasikan pada tabel 5 yakni t -0,997 serta sig. 0,321. Temuan ini melaporkan hubungan negatif yang lemah antara persentase pihak independen di dewan dan ARL, dan konsisten dengan temuan dari Nelson & Shukeri (2011), Kaaroud et al (2020) serta Naimi et al (2010) yang di temuannya tersebut menjelaskan bahwa dalam menunjuk pihak independen, perusahaan perlu menetapkan alasan mengapa pihak tersebut dianggap independen sebagai arah yang benar untuk meyakinkan pihak investor menilai keabsahan pihak independen tersebut, bukan hanya sekadar julukan “independen”.

Ukuran Komite Audit terhadap *Audit Report Lag*

Hipotesis kedua mengharapkan hubungan negatif antara ukuran komite audit dan sejauh mana tingkat ARL di lembaga perbankan syariah Indonesia, namun hipotesis tersebut ditolak berdasarkan pengujian yang telah dilakukan seperti yang telah divisualisasikan pada tabel 5 yakni t 0,315 serta sig. 0,753. Temuan ini melaporkan hubungan positif yang lemah antara kehadiran anggota yang lebih banyak di komite dan ARL, serta konsisten dengan temuan dari Lajmi & Yab (2021) dan Sultana et al. (2015) yang di temuannya tersebut menjelaskan bahwa karakteristik komite audit kontemporer seperti *size* tidak langsung memiliki dampak pada durasi tingkat ARL akan tetapi mempengaruhi peristiwa akuntansi keuangan, transaksi yang terjadi serta laporan di masa depan.

Keahlian Komite Audit terhadap *Audit Report Lag*

Hipotesis ketiga mengharapkan hubungan negatif antara keahlian komite audit dan sejauh mana tingkat ARL di lembaga perbankan syariah Indonesia, namun hipotesis tersebut ditolak berdasarkan pengujian yang telah dilakukan seperti yang telah divisualisasikan pada tabel 5 yakni t -1,626 serta sig. 0,107. Temuan ini melaporkan hubungan negatif yang lemah antara kehadiran anggota yang memiliki keahlian akuntansi dan/atau keuangan di komite dan ARL, serta konsisten dengan temuan dari Salleh et al (2017) dan Nelson & Shukeri (2011) yang di temuannya tersebut

menjelaskan bahwa karakteristik komite audit seperti keahlian tidak langsung memiliki dampak pada durasi tingkat ARL, mengingat peraturan yang ketat terhadap perusahaan yang terdaftar di otoritas negara masing-masing yang mengharuskan perusahaan memiliki setidaknya satu anggota ahli keuangan dari tiga anggota total.

Rapat Komite Audit terhadap *Audit Report Lag*

Hipotesis keempat mengharapkan hubungan negatif antara rapat komite audit dan sejauh mana tingkat ARL di lembaga perbankan syariah Indonesia, hipotesis tersebut diterima berdasarkan pengujian yang telah dilakukan seperti yang telah divisualisasikan pada tabel 5 yakni $t = -2,865$ serta $sig. = 0,005$. Temuan ini melaporkan hubungan negatif yang signifikan antara rapat yang diadakan sepanjang tahun oleh komite audit dan ARL, serta konsisten dengan temuan dari Naimi et al (2010) dan Sultana et al. (2015) yang di temuannya tersebut menjelaskan bahwa dengan meningkatnya frekuensi pertemuan, kesempatan bagi anggota komite audit untuk memantau proses audit secara efektif juga akan meningkat yang pada gilirannya menyusutkan durasi tingkat ARL.

Rapat Dewan Pengawas Syariah terhadap *Audit Report Lag*

Hipotesis kelima mengharapkan hubungan yang terkait antara rapat dewan pengawas syariah dan sejauh mana tingkat ARL di lembaga perbankan syariah Indonesia, namun hipotesis tersebut ditolak berdasarkan pengujian yang telah dilakukan seperti yang telah divisualisasikan pada tabel 5 yakni $t = 0,132$ serta $sig. = 0,895$. Temuan ini melaporkan hubungan dengan signifikan lemah antara rapat yang diadakan sepanjang tahun oleh dewan pengawas syariah dan ARL, serta mendukung dengan temuan dari Kaaroud et al (2020) dan Zulfikar et al (2020) yang di temuannya tersebut menjelaskan bahwa tidak dapat membuktikan hipotesis yang dirancang terhadap tingkat ARL yang dimungkinkan karena sebab hubungan UUS dan perusahaan induknya yang lebih fokus pada konvensional *corporate governance*.

KESIMPULAN

Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap ARL dan hipotesis tersebut ditolak berdasarkan pengujian yang telah dilakukan. Penelitian ini tidak mendukung pernyataan dari teori agensi yang menyatakan bahwa semakin banyak tingkat proporsi komisaris yang independen dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif dan pada akhirnya menyusutkan durasi pada tingkat ARL. Hipotesis kedua mengharapkan hubungan negatif antara ukuran komite audit dan sejauh mana tingkat ARL di lembaga perbankan syariah Indonesia, namun hipotesis tersebut ditolak berdasarkan pengujian yang telah dilakukan. Penelitian ini memberikan hasil yang berbeda dari pernyataan bahwa semakin banyaknya jumlah komite audit pada bank syariah akan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, kemudian mengurangi lamanya proses audit laporan keuangan. Hipotesis ketiga mengharapkan hubungan negatif antara keahlian komite audit dan sejauh mana tingkat ARL di lembaga perbankan syariah Indonesia, namun hipotesis tersebut ditolak. Dengan demikian, meningkatkan anggota yang memiliki kepandaian keahlian akuntansi atau pengalaman keuangan tidak semata-mata merampingkan proses penyelesaian *audit report lag*. Hipotesis keempat mengharapkan hubungan negatif antara rapat komite audit dan sejauh mana tingkat ARL di lembaga perbankan syariah Indonesia, hipotesis tersebut diterima. Rupanya, hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pelaksanaan rapat komite audit mampu menghadirkan peluang dan memberikan keuntungan yang efektif untuk menyelesaikan masalah yang muncul sepanjang proses penyusunan laporan keuangan. Rapat dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap sejauh mana tingkat ARL di lembaga perbankan syariah Indonesia. Penyebab hal tersebut karena dewan pengawas syariah lebih memastikan bahwa perbankan syariah tidak melanggar prinsip syariah. Lalu yang terakhir merupakan variabel kontrol yakni IBSIZE, mempunyai nilai $t = -2,280$ serta nilai signifikan $0,024$. Artinya, nilai t tersebut menunjukkan arah negatif sedangkan nilai signifikan $0,024$ memberitahukan pengaruh variabel IBSIZE terhadap dependennya. Berdasarkan hasil tersebut bisa diambil keputusan bahwa perusahaan yang besar secara negatif terkait dengan tingkat ARL di lembaga perbankan syariah di Indonesia

Penelitian ini tak berbeda dengan penelitian yang ada, terdapat keterbatasan yang ditemukan selama penelitian, maka dari itu peneliti merangkum beberapa kesesuaian yang perlu dipertimbangkan ketika peneliti selanjutnya ingin melakukan eksplorasi lebih dalam. Khususnya, di

antara keterbatasan yang datang adalah dari sampel yang dipilih dan ukurannya, karena beberapa sampel tidak mendukung variabel yang menjadi bahan pertimbangan peneliti. Perlu juga dicatat bahwa penelitian ini menggunakan UUS yang mana laporan tahunannya mengikuti induk perusahaan, sehingga beberapa informasi tidak relevan. Penelitian ini menggunakan pengukuran variabel yang dirasa kurang cocok ketika pengujian dilakukan.

Saran yang diberikan bisa menjadi subjek penelitian masa depan agar dapat mengembangkan topik yang masih jarang diteliti ini, yakni topik mekanisme tata kelola perusahaan dan hubungannya dengan ARL di lembaga syariah. Dapat memperluas sampel penelitian untuk mencakup beberapa bidang yang berbeda sehingga temuan yang dihasilkan memiliki jangkauan yang lebih luas. Diharapkan penelitian selanjutnya memperhatikan bentuk perusahaan yang dijadikan sampel agar hasil yang dijabarkan bisa lebih sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Peneliti diharapkan untuk memperhatikan penggunaan pengukuran variabel, serta mengganti pengukuran yang sesuai agar hasil yang didapatkan menjadi semakin maksimal.

REFERENSI

- Afify, H. A. E. (2009). Determinants of audit report lag: Does implementing corporate governance have any impact? Empirical evidence from Egypt. *Journal of Applied Accounting Research*, 10(1), 56–86. <https://doi.org/10.1108/09675420910963397>
- Al-Ajmi, J. (2008). Audit and reporting delays: Evidence from an emerging market. *Advances in Accounting*, 24(2), 217–226. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2008.08.002>
- Baklouti, I. (2020). Is the Sharia supervisory board a friend or an enemy of Islamic banks? *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2020-0118>
- Durand, G. (2019). The determinants of audit report lag: a meta-analysis. *Managerial Auditing Journal*, 34(1), 44–75. <https://doi.org/10.1108/MAJ-06-2017-1572>
- Financial Accounting Standard Board. (2010). *Conceptual Framework for Financial Reporting*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Diponegoro University Publishers Agency.
- Habib, A., & Bhuiyan, Md. B. U. (2011). Audit firm industry specialization and the audit report lag. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 20(1), 32–44. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2010.12.004>
- Hani Warrad, L. (2018). The Extent to Which the Corporate Governance Characteristics Has Affected the Audit Report Lag in Jordanian Banks. *International Journal of Business and Management*, 13(12), 81. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v13n12p81>
- Hashim, U., & Rahman, R. A. (2011). Audit report lag and the effectiveness of audit committee among Malaysian listed companies. *International Bulletin of Business Administration*, 10, 50–61.
- Ika, S. R., & Mohd Ghazali, N. A. (2012). Audit committee effectiveness and timeliness of reporting: Indonesian evidence. *Managerial Auditing Journal*, 27(4), 403–424. <https://doi.org/10.1108/02686901211217996>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2012). *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE. In *Journal of Financial Economics* (Vol. 3). Q North-Holland Publishing Company.
- Kaaroud, M. A., Mohd Ariffin, N., & Ahmad, M. (2020). The extent of audit report lag and governance mechanisms: Evidence from Islamic banking institutions in Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(1), 70–89. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2017-0069>
- Lajmi, A., & Yab, M. (2021). The impact of internal corporate governance mechanisms on audit report lag: evidence from Tunisian listed companies. *EuroMed Journal of Business*. <https://doi.org/10.1108/EMJB-05-2021-0070>
- Naimi, M., Nor, M., Shafie, R., Nordin, W., & Hussin, W.-. (2010). Corporate Governance and Audit Report Lag in Malaysia. In *Article in Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance*. <http://ssrn.com/abstract=1695085>

- Nelson, S. P., & Shukeri, S. N. (2011). Corporate governance and audit report timeliness: Evidence from Malaysia. *Research in Accounting in Emerging Economies*, 11(1), 109–127. [https://doi.org/10.1108/S1479-3563\(2011\)0000011010](https://doi.org/10.1108/S1479-3563(2011)0000011010)
- Neter, J. (1997). *Model Linear Terapan*.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (2014).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, (2015).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *POJK No 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik*.
- Owusu-Ansah, S. (2000). Timeliness of corporate financial reporting in emerging capital markets: Empirical evidence from the Zimbabwe Stock Exchange. *Accounting and Business Research*, 30(3). <https://doi.org/10.1080/00014788.2000.9728939>
- Raghunandan, K., Rama, D. v, & Scarbrough, D. P. (1998). *Accounting and Auditing Knowledge Level of Canadian Audit Committees: Some Empirical Evidence*.
- Rahmawan Arifin, M., Rosadi, S., Nugroho, A., & Wahyuningsih, T. (2021). Characteristics of the Sharia Supervisory Board, Sharia Company Size, Zakah, and Islamic Social Reporting on Sharia Banks in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 15–28. <https://doi.org/10.22219/jes.v6i1.17100>
- Raweh, N. A. M., Kamardin, H., & Malik @ Malek, M. (2019). Audit Committee Characteristics and Audit Report Lag: Evidence From Oman. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 9(1), 152. <https://doi.org/10.5296/ijaf.v9i1.14170>
- Rini, R. (2014). The effect of audit committee role and sharia supervisory board role on financial reporting quality at Islamic banks in Indonesia. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 17(1), 145. <https://doi.org/10.14414/jebav.v17i1.273>
- Salleh, Z., Baatwah, S. R., & Ahmad, N. (2017). Audit Committee Financial Expertise and Audit Report Lag: Malaysia Further Insight. *Asian Journal of Accounting and Governance*, 8, 137–150. <https://doi.org/10.17576/AJAG-2017-08-12>
- Sultana, N., Singh, H., & van der Zahn, J. L. W. M. (2015). Audit Committee Characteristics and Audit Report Lag. *International Journal of Auditing*, 19(2), 72–87. <https://doi.org/10.1111/ijau.12033>
- Zulfikar, Z., Bawono, A. D. B., Mujiyati, M., & Wahyuni, S. (2020). Sharia corporate governance and financial reporting timeliness: Evidence of the implementation of banking regulations in Indonesia. *Banks and Bank Systems*, 15(4), 179–192. [https://doi.org/10.21511/bbs.15\(4\).2020.15](https://doi.org/10.21511/bbs.15(4).2020.15)